



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

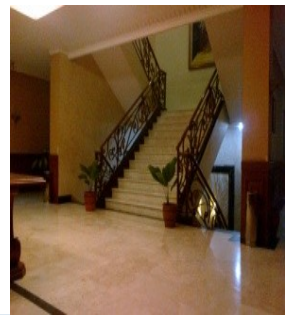
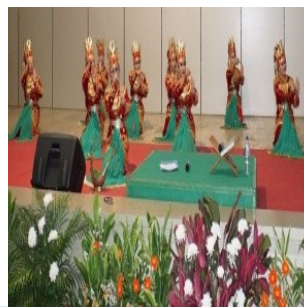
BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI JAMBI

TAHUN 2016-2021



BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018



KATA PENGANTAR

Pemerintahan hadir untuk menjawab solusi bagi masyarakat, Penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam system sebuah Negara, esensinya menciptakan pembangunan yang merata keberbagai aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat. Banyak sebab musabab Kegagalan Penyelenggaraan Pemerintah, Negara dan Pembangunan yang baik karena tidak mengindahkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*. TAP-MPR RI No. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menegaskan tekad bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Tahun 2018, sebagaimana diatur pasal 342 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dengan telah disusunnya Perubahan RENSTRA ini diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi lebih akuntabel karena sudah terpola dan terpadu dalam mencapai visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Jakarta, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN,



REFLI, SH

Penata Tk.I

NIP.19690404 199103 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Pengertian	3
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Sistematika Penulisan	7
1.6. Hubungan Perubahan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	11
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI.....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3. Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.....	35
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jambi	39
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	44
4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi	

Jambi .	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
5.1 Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	46
5.2 Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	49
6.1 Rencana Program Dan Kegiatan	49
6.2 Pendanaan	51
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.....	10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, Kondisi 31 Desember Tahun 2018	17
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin	17
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.5 Daftar Nama - nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, per 31 Desember Tahun 2018.....	19
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin	21
Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	23
Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	24
Tabel 2.10 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari Retribusi Jasa Mess di Jakarta dari Tahun 2007 s/d 31 Desember 2018 (dalam Rp.000,-)	25
Tabel 2.11 Target dan Realisasi Tingkat Hunian kamar Mess Pemda Jambi, Rentang Waktu Tahun 2010-2018	26
Tabel 2.12 Penghargaan Yang Diterima Anjungan Jambi TMII, dari tahun 2015-2018	28
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target Capaian dan Kondisi Akhir 2021 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	45

Tabel 5.1	Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	47
Tabel 5.2	Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	48
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2016-2021	53

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2016-2021	
Lampiran 2 Data Kendaraan Bermotor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Di Jakarta,Keadaan 31 Desember 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang bermuatan upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, kebutuhan akan organisasi, kegiatan organisasi dan dasar legitimasinya.

Otonomi Daerah yang telah menjadi pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah menuntut adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, secara terus menerus melalui perubahan kearah perbaikan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance*. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Paradigma baru pemerintahan yang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* menuntut adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan prima (*Excellent Service*) dari unit-unit pemerintahan. Hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di mana salah satunya mewajibkan setiap Instansi Pemerintahan untuk menyusun Rencana Strategis.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai unsur staf yang membantu Gubernur Jambi, memiliki peran yang cukup penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jambi yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Oleh karena itu Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dituntut untuk senantiasa dinamis dan responsif terhadap perubahan yang berkembang di masyarakat. Dalam kerangka itulah disusun Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Strategis ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD, dasar penilaian kinerja Kepala SKPD dan menjadi acuan penyusunan LKJ SKPD. Perubahan Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jambi.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dibuat dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 Tahun 2018, sebagaimana diatur pasal 342 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Rencana Strategis ini menguraikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang juga merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang strategis guna mencapai visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stakeholder yang terkait dengan pemerintahan serta pihak eksekutif dan legislative baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian bidang Pemerintahan khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implementasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

Perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan hal yang tidak terelakan. Demikian pula halnya dengan Pemerintahan Daerah Provinsi. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan. Hal ini lah yang cukup merepotkan pemerintahan daerah.

Perubahan ini juga berdampak terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan penyelarasan RPJMN dengan RPJMD.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang pemerintahan.
- b. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

1.2.2 Tujuan

Adapun Tujuan dari disusunnya Perubahan Renstra ini adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dan tersusunnya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau perencanaan di bidang pemerintahan.
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan penilaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sehingga turut mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

1.3 PENGERTIAN

Rencana Strategis ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Perubahan Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021, yang mengacu pada Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, Tahun 2018.

1.4 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021 berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 21. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008, Nomor 14); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

- Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014, Nomor 6);
- 22.**Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
- 23.**Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 0013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
- 24.**Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- 25.**Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi;
- 26.**Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021;
- 27.**Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta;

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara umum Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Pengertian

1.4 Landasan Hukum

1.5 Sistematika Penulisan

1.6.Hubungan Perubahan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

- 2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jambi
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
- 5.2 Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program Dan Kegiatan
- 6.2 Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

1.6. HUBUNGAN PERUBAHAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Adapun hubungan Perubahan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

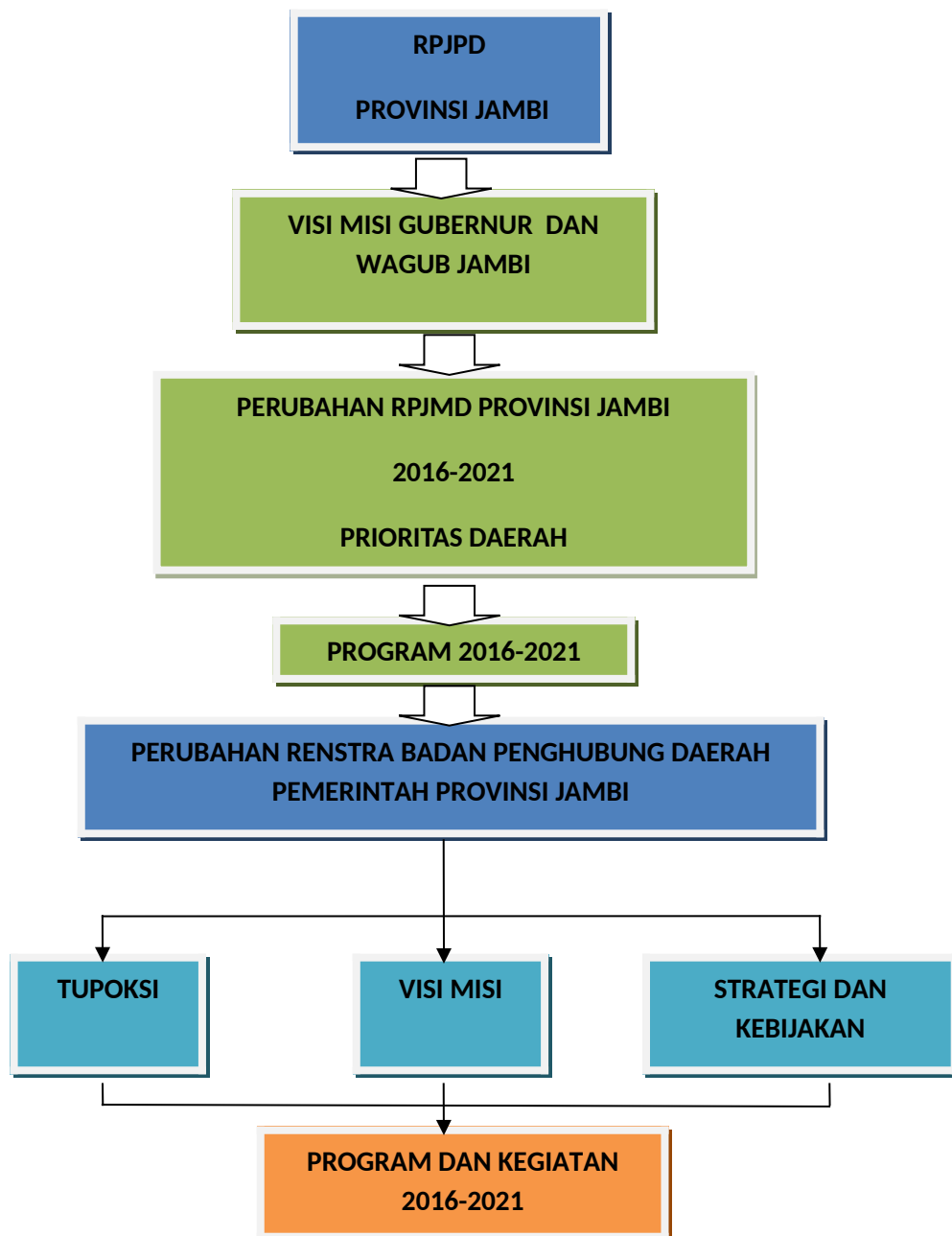
- 1.6.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun yang memuat Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun.

- 1.6.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN.
- 1.6.3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN, yang mengalami perubahan.
- 1.6.4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.
- 1.6.5. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, yang mengalami perubahan.
- 1.6.6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun

berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

Gambaran kerangka pikir penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengikuti Hierarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1 :

Gambar 1
Kerangka pikir penyusunan Perubahan RENSTRA Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021



Sumber: Data diolah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tertuang dalam peraturan daerah provinsi Jambi nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Jambi dan peraturan Gubernur Jambi nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi. Disebutkan pada pasal 2 bahwa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang penghubung daerah provinsi yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagaimana tersurat pada pasal 4 peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, yaitu ;

- a. penghubung antar pemerintah daerah dengan pemerintah, lembaga pemerintah non departemen dan swasta di Jakarta;
- b. pembinaan masyarakat daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi/luar daerah;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data atau informasi;
- d. pengadaan kegiatan promosi, ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- e. pengelolaan anjungan daerah Jambi di Taman Mini Indonesia Indah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera dalam peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016, terdiri dari ;

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi bersama subbagian tata usaha, subbidang pengelolaan mess dan aset, subbidang pelayanan dan hubungan antar lembaga, subbidang promosi, informasi dan seni budaya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan administrasi tata naskah dinas, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pendistribusian surat menyurat dan pengadaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi kenaikan pangkat, pelatihan, disiplin pegawai ASN, mutasi, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, asuransi kesehatan, tabungan dan asuransi pensiun (TASPEN) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- c. pelaksanaan evaluasi kehadiran dan penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan;
- d. pengusulan penerima penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai ASN;
- e. pembuatan daftar urut kepangkatan;
- f. pembuatan database pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan urusan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- h. perencanaan dan pengelolaan perpustakaan;
- i. pengkajian, perencanaan, penyusunan dan pengevaluasi program kerja;
- j. pemantauan dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan penyiapan bahan evaluasi serta penyusunan laporan;
- k. pelaksanaan dan penyiapan laporan dan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset

Mempunyai tugas mengelola mess Jambi dan aset pemerintah provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bidang Pengelola Mess dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengevaluasi standar operasional pelayanan mess dan aset pemerintah provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- b. penata dan menginventarisir sarana dan prasarana mess dan aset pemerintah provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengambil langkah-langkah pelaksanaan pemeliharaan mess dan aset pemerintah provinsi Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/Luar Daerah;
- d. pelaksanaan urusan kontrol pemeliharaan sarana/prasarana kartu inventaris barang;
- e. pelaksanaan urusan promosi mess jambi, peningkatan pelayanan dengan sistem pelaporan penerimaan mess; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang keprotokolan, kehumasan, akomodasi, transportasi, hubungan antar lembaga pemerintah provinsi, lembaga-lembaga pemerintah departemen/non departemen, swasta dan internasional serta pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah yang berkaitan dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bidang Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program kerja kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- b. pelaksanaan kegiatan keprotokolan, kehumasan, akomodasi dan transportasi serta hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang dan Bekasi/luar daerah;

- e. pengurusan, penyiapan kelengkapan administrasi dan perjalanan gubernur, wakil gubernur, ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan sekretaris daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan koordinasi mengenai hubungan kerja yang sedang dan akan dilaksanakan antara pemerintah provinsi dengan lembaga pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non departemen), swasta dan internasional;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- h. pemberian bantuan kepada para pejabat pemerintah provinsi dalam rangka hubungan kerja dengan pemerintah (lembaga-lembaga pemerintah departemen dan non departemen), swasta dan internasional di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi /luar daerah;
- i. pengumpulan dan pengelola data atau informasi tentang masyarakat Jambi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi /Luar Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bidang promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bidang Promosi Informasi dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- b. pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk melakukan kegiatan promosi pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan program kerja kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata di tingkat nasional dan internasional;
- d. pengkoordinasi kegiatan anjungan Jambi dan Taman Mini Indonesia Indah;
- e. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Jambi, meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata baik di dalam dan di luar Taman Mini Indonesia Indah;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan program dan informasi pembangunan daerah serta pengelolaan anjungan Jambi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok jabatan fungsional umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada kepala subbag/subbid masing-masing. Kebutuhan jabatan fungsional umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi



2.2. Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, yaitu berupa jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada tanggal 31 Desember Periode Tahun 2018 berjumlah 96 orang terdiri dari 62 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 34 orang pegawai Tidak Tetap. Rincian 62 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|----------|----------|
| 1. Golongan I | sebanyak | 5 orang |
| 2. Golongan II | sebanyak | 23 orang |
| 3. Golongan III | sebanyak | 30 orang |
| 4. Golongan IV | sebanyak | 4 orang |

Penyebaran jumlah pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut atau pada lampiran 1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, keadaan 31 Desember 2018.

Tabel.2.1 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, Kondisi 31 Desember Tahun 2018

No.	Golongan	Pegawai (oarnng)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	3	2	5
2	II	21	2	23
3	III	12	18	30
4	IV	-	4	4
Jumlah		36	26	62

Sumber : Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2018

Berdasarkan eselonering dan jenis kelamin, jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari 1 eselon IIIa dan 4 eselon IVa serta 57 orang fungsional umum, sebagaimana ditunjukkan tabel 2.2. berikut.

Tabel.2.2 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Eselonering dan Jenis Kelamin

No.	Eselonering	Jumlah Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	III.a	1	-	1
2.	IV.a	2	2	4
3.	Fungsional Umum	31	26	57
Jumlah		34	28	62

Sumber: Bapegda Prov Jambi , per 31 Desember 2018

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiri dari; tamatan SD sebanyak 6 orang, tamatan

SLTP sebanyak 5 orang, tamatan SLTA sebanyak 21 orang, tamatan Sarjana Muda (DIII) sebanyak 1 orang, tamatan Sarjana (SI) sebanyak 22 orang dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 6 orang, jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca sarjana (S2)	2	4	6
2.	Sarjana (S1)	9	15	24
3.	Sarjana Muda (DIII)	-	1	1
4.	SLTA	14	6	20
5.	SLTP	4	1	5
6.	SD	5	1	6
	Jumlah	34	28	62

Sumber: Bapenda Prov Jambi, per 31 Desember 2018

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, kualifikasi pendidikan pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, bila dilihat dari pendidikan SLTA ke atas, pegawai perempuan yang berpendidikan tamatan Sarjana Muda (DIII), Sarjana (SI) dan tamatan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 26 orang sementara untuk kualifikasi pendidikan yang sama bagi pegawai laki-laki sebanyak 25 orang.

Selanjutnya berdasarkan Tingkat Usia, jumlah pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi terdiri dari: 2 orang usia 26-30 tahun, 6 orang usia 31-35 tahun, 15 orang usia 36-40 tahun, 5 orang usia 41-45 tahun, 15 orang usia 46-50 tahun, 16 orang usia 51-55 tahun dan 3 orang usia 56-60 tahun seperti ditunjukkan tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Usia (tahun)	Pegawai (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	26 - 30	1	1	2
2	31 - 35	2	4	6
3	36 - 40	10	5	15
4	41 - 45	2	3	5
5	46 - 50	9	6	15
6	51 - 55	9	7	16
7	56 - 60	2	1	3
T o t a l		35	27	62

Sumber: Bapegda Prov Jambi , per 31 Desember 2018

Untuk jelasnya nama-nama pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi pada posisi 31 Desember Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran 1 yaitu Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tanggal 31 Desember Tahun 2018. Sedangkan 34 orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari 28 orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 6 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Daftar Nama-nama Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, per 31 Desember Tahun 2018

NO	N A M A	Tempat, Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		PENDIDIKAN FORMAL	Penerimaan SK PTT	
			Laki-laki	Perempuan		No & Tgl SK	Yang Mengeluarkan SK
1.	MUHAMMAD YUNUS	Tasikmalaya, 3-11-1943	Laki-laki	-	SD	Tgl.01-01-2005	
2.	EFENDI AHMAD	Jakarta, 19-03-1986	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
3.	FERIANTO, ST	Sukoharjo, 15-02-1980	Laki-laki	-	SARJANA	237/Kep.Gub/Phb/Jbi/2007 Tgl.15-06-2007	Gubernur Jambi
4.	RITNO	Cilacap, 21-07-1977	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2006	
5.	ANDRI WIDAYANTO	Jakarta, 19-03-1986	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2005	
6.	SUWARSO	K.Manjangan, 14-12-1964	Laki-laki	-	SLTP	Tgl.01-01-2008	
7.	EPENDI	Jakarta, 23-10-1967	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
8.	AGUNG PRATAMA	Tangerang, 24-05-1990	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
9.	YULI	Jakarta, 15-02-1976	-	Perempuan	SD	Tgl.01-04-2010	
10.	ABDUL ROHMAN	Tasikmalaya, 05-11-1971	Laki-laki	-	SLTA	No.02 Tahun 2010 Tgl.01-04-2010	

11.	DEDI SETIAWAN	Tangerang, 04-06-1983	Laki-laki	-	SLTA	No.02 Tahun 2010 Tgl.01-04-2010	
12.	Rd. SYANGGI PRATAMA RAVITHO	Jambi, 15-07-1985	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2011	
13.	SUPRIYANTO	Jakarta, 29-12-1978	Laki-laki	-	D1	No.02 Tahun 2011 Tgl.01-01-2011	
14.	SATIMO	Wonogiri, 11-07-1965	Laki-laki	-	SLTA	No.13 Tahun 2011 Tgl.01-07-2011	
15.	M.BAGAS RIGIASTA	Jakarta, 23-10-1980	Laki-laki	-	SLTP	No.824/217/SPT/BAPEGDAP ROV.I/VIII/18 ,Tgl.01-08-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
16.	MARHADI	Tangerang, 16-09-1982	Laki-laki	-	S1	Tgl.01-01-2016	
17.	BENI HARTANTO,S.Pd,I	Dusun Tinggi, 12-04-1988	Laki-laki	-	SARJANA	Tgl.01-10-2012	
18.	HAROMAINI	Jambi, 24-12-1984	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.02-01-2014	
19.	ELINA DARWANI	Jambi, 23-03-1981	-	Perempuan	S1	Tgl.01-10-2014	
20.	AMRULLAH	Palembang, 04-08-1977	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-10-2014	
21.	HARRY SETYAWAN	Jambi, 24-04-1995	Laki-laki	-	S1	S2/Kep.BAPEGDAPROV.I/ Tgl.	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
22.	JOKO SULISTYONO	Boyolali, 14-04-1985	Laki-laki	-	SLTA	No.11 Tahun 2008 Tgl.01-01-2009	
23.	JAJAT SUDRAJAT	Tasikmalaya, 01-08-1980	Laki-laki	-	SLTA	No.02 Tahun 2011 Tgl.18-01-2011	
24.	YAHYA MUHAIMIN	Kebumen, 26-05-1991	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-03-2016	
25.	M. HASAN	Langan Tengah, 07-09-1968	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
26.	YERRI PURWA ANWAR	Jakarta, 09-12-1979	Laki-laki	-	D3	Tgl.01-01-2011	
27.	SUYADI	Ciamis, 07-05-1969	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.01-01-2008	
28.	AINAYAH KHAERUNNISAI	Senglang, 28-08-1998	-	Perempuan	SLTA	21/Kep.BAPEGDAPROV.I/ IV/2018 Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
29.	RINANDA CENDRAKASIH	Jambi, 04-07-1995	-	Perempuan	SARJANA	S/824/214/SPT/BAPEGDAPROV.I/ V/2018 Tgl.07-05-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
30.	MIRANDA INKO SHERLY	Pati, 20-08-1999	-	Perempuan	SLTA	S/824/212/SPT/BAPEGDAPROV.I/ IV/2018 Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
31.	WIDHI SASONGKO JATI	Pekalongan, 26-07-1986	Laki-laki	-	SLTA	Tgl.02-04-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
32.	WAGIMIN	Kebumen, 27-01-1988	Laki-laki	-	SLTA	S/800/64/BAPEGDAPROV.I/ V/2018 Tgl.02-05-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
33.	PUTRI THARA BANOWATI	Jakarta, 13-08-2000	-	Perempuan	SLTA	S2/Kep.BAPEGDAPROV.I/ VII/2018 Tgl.03-07-2018	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi

34.	M. RIDWAN	Jakarta, 27-08-1988	Laki-laki	-	SLTA	S2/Kep.BAPEGDAPROV.I/ Tgl.	Kepala Badan Penghubung Daerah Prov.Jambi
Jumlah			28	6	S1,SLTA,SLTP dan SD		

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember Tahun 2018

Tabel 2.5. menunjukkan bahwa berdasarkan kualifikasi pendidikan, jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai jenjang pendidikan tertinggi terdiri dari; tamatan SD sebanyak 2 orang, tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA sebanyak 22 orang, tamatan Sarjana Muda (DIII) sebanyak 2 orang dan tamatan Sarjana (SI) sebanyak 6 orang, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Kualifikasi Pendidikan	Pegawai Tidak tetap (PTT) dalam orang		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2.	Sarjana (S1)	4	2	6
3.	Sarjana Muda (DIII)	2	-	2
4.	SLTA	19	3	22
5.	SLTP	2	-	2
6.	SD	1	1	2
	Jumlah	27	6	34

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember Tahun 2018

Selanjutnya jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 2.7. berikut.

Tabel 2.7 Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Tingkat Usia dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Usia	Pegawai (orang)	

	(tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	16 - 20	-	3	3
2	21 - 25	-	1	1
3	26 - 30	4	-	4
4	31 - 35	8	-	8
5	36 - 40	6	1	7
6	41 - 45	2	1	3
7	46 - 50	3	-	3
8	51 - 55	4	-	4
9	56 - 60	-	-	-
10	61 - 65	-	-	-
11	66 - 70	-	-	-
12	71 - 75	1	-	1
T o t a l		28	6	34

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember Tahun 2018

Tabel 2.7 menunjukkan rentang usia Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari yang paling muda antara 16-20 tahun sebanyak tiga orang dengan jenis kelamin perempuan dan yang paling tua berusia 75 tahun sebanyak satu orang dengan jenis kelamin laki-laki.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah tersedia peralatan pendukung kerja yang berpengaruh dan mendukung operasional organisasi yang meliputi ruang kerja, ruang rapat, meubelair, laptop ataupun perangkat komputer lengkap (CPU, monitor, printer, keyboard, UPS), alat komunikasi (telepon, faksimili, telex, dan sandi) dan sarana transportasi baik berupa kendaraan dinas pejabat (mobil dan sepeda motor) maupun kendaraan dinas operasional pelayanan lainnya.

Sarana dan Prasarana saat ini yang tersedia yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri dari kendaraan dinas, sebagaimana pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis/Merk	Jumlah	Kondisi
A	KENDARAN RODA EMPAT	14	Baik
1	Jaguar	1	Baik
2	Mitsubishi Kuda	1	Baik

3	Mitsubishi L 300	1	Baik
4	Toyota Furtuner	2	Baik
5	Nissan X-Trail	1	Baik
6	Kia Travelo	1	Baik
7	Toyota Furtuner	2	Baik
8	Toyota Avanza	1	Baik
9	Honda City (Pinjam biro humas)	1	Baik
10	Honda CRV (Pinjam biro humas)	1	Baik
11	Fortuner (Pinjam biro humas)	2	Baik
B	KENDARAAN RODA DUA	16	Baik dan Rusak Berat
1	Vespa Scooter	2	Rusak Berat
2	Honda Astrea	2	Rusak Berat
3	Honda Supra NF	2	Rusak Berat
4	Honda Supra X 125	3	Baik
5	Honda New Supra X 125	1	Baik
6	Honda Supra X 125 CW	4	Baik
7	Suzuki Thunder	2	Baik

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2018

Selain Kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ada pula peralatan dan teknologi penunjang kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada tabel 2.9. berikut.

Tabel 2.9. Sarana dan Prasarana Peralatan Dan Teknologi Penunjang Kegiatan Administrasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis/Merk	Jumlah	Kondisi
1	Komputer PC	12	4rusak berat, 8 baik
2	Lasptop	10	4rusak berat, 6 baik
3	Printer	10	2rusak berat, 8 baik
4	Mesin Faximile	1	Baik
5	Scanner	1	Rusak Berat
6	Meja kerja	30	Baik
7	Meja Rapat Besar	1	Baik
8	Kursi Kerja	30	Baik
9	Lemari Arsip	1	Baik
10	Filling Kabinet	6	2rusak berat, 4 baik
11	Ruang rapat	1	Baik
12	Brankas	4	2rusak berat, 2 baik
13	Mesin Tik	2	Rusak berat
14	AC	10	baik

Sumber: Bapegda Prov Jambi, per 31 Desember 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dengan sasaran target

sesuai dengan Renstra atau berdasarkan atas hasil analisis standard kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja indikator Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mengacu pada tujuan dan sasaran target sesuai dengan Renstra yang berdasarkan atas hasil standard kebutuhan pelayanan.

Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan juga dapat dilihat dari Target dan Realisasi pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi atas penyewaan Mess Pemda Jambi dan Anjungan Jambi di Taman Mini Indonesia Indah dari tahun 2010 sampai tahun 2018.

Mess Pemerintah Daerah di Jakarta berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi Usaha Jasa Umum juga berperan sebagai Pelayanan Sosial membantu masyarakat Jambi sebagai tempat menginap selama berada di Jakarta, ini sangat membantu baik masyarakat maupun PNS yang menjalankan aktifitasnya di Jakarta. Jumlah kamar yang tersedia di mess sebanyak 43 kamar yang terdiri dari 5 kamar VIP dan 38 kamar standar, dengan kondisi baik. Perkembangan Pendapatan daerah Jambi dari retribusi jasa mess di Jakarta dari Tahun 2007 s/d 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Target dan Realisasi Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dari Retribusi Jasa Mess di Jakarta dari Tahun 2007 s/d 31 Desember 2018 (dalam Rp.000,-)

No.	Tahun	Target	Realisasi	% Pencapaian Target	Keterangan
1.	2007	1.500.000	1.608.425	107,23	Harga kamar standar permalam Rp.150.000,- dan VIP Rp.200.000,-
2.	2008	1.600.000	1.708.050	106,8	Harga kamar standar permalam Rp.150.000,- dan VIP Rp.200.000,-
3.	2009	1.650.000	1.721.625	104,3	Harga kamar standar permalam Rp.150.000,- dan VIP Rp.200.000,-
4.	2010	1.700.000	1.913.425	112,60	Harga kamar standar permalam Rp.150.000,- dan VIP Rp.250.000,-
5.	2011	1.900.000	2.448.900	128,8	Harga kamar standar permalam Rp.200.000,-

					dan VIP Rp.250.000,-
6.	2012	2.008.000	2.442.700	122,10	Harga kamar standar permalam Rp.200.000,- dan VIP Rp.300.000,-
7.	2013	2.720.000	2.801.120	103	Harga kamar standar permalam Rp.250.000,- dan VIP Rp.350.000,- (Pergub Jambi Nomor 487)
8.	2014	2.888.650	2.510.300	87	Harga kamar standar permalam Rp.250.000,- dan VIP Rp.350.000,-
9.	2015	2.883.273,96	2.452.875	85	Harga kamar standar permalam Rp.350.000,- dan VIP Rp.500.000,- (Perda Provinsi Jambi Nomor 67)
10.	2016	2.630.000	2.017.925	77	Harga kamar standar permalam Rp.350.000,- dan VIP Rp.500.000,-
11.	2017	2.651.300	1.482.400	56	Harga kamar standar permalam Rp.350.000,- dan VIP Rp.500.000,-
12.	2018	2.725.464	1.409.000	51,70	Harga kamar standar permalam Rp.350.000,- dan VIP Rp.500.000,-

Sumber : Bagian Mess Jambi, per 31 Desember 2018, Data Diolah

Target dan Realisasi Tingkat Hunian kamar Mess Pemda Jambi selama rentang waktu tahun 2010-2018 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Target dan Realisasi Tingkat Hunian kamar Mess Pemda Jambi, Rentang Waktu Tahun 2010-2018

Tahun	Target Tingkat Hunian Kamar (kamar)		Realisasi Tingkat Hunian Kamar (kamar)		Persentase Realisasi Hunian Kamar (%)		Keterangan (kamar)	
	VIP	Standar	VIP	Standar	VIP	Standar	Kamar Rusak	Kamar Tidak Terisi
2010	1.800	12.240	1.223	10.680	67,94	87,25	131	2.192
2011	1.800	12.240	1.121	10.552	62,28	86,21	147	2.384
2012	1.800	12.240	1.058	10.124	58,78	82,71	310	2.645
2013	1.800	12.240	1.257	9.209	69,83	75,24	80	3.191

2014	1.800	12.240	1.223	7.869	67,94	64,29	89	4.604
2015								
2016								
2017								
2018								

Sumber: Bagian Mess Jambi, per 31 Desember 2018, Data Diolah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.10. Tabel 2.10 menunjukkan bahwa persentase realisasi pencapaian target pendapatan daerah Jambi dari mess Jambi di Jakarta sejak dari tahun 2007 sampai dengan 2013 selalu diatas 100 persen, akan tetapi mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018 persentase realisasi pencapaian target tersebut mulai menurun dan di bawah 100 persen. Data tahun 2018 menunjukkan persentase realisasi pencapaian target sebesar 51,70 persen, kemungkinan hal ini disebabkan oleh ;

1. Target pendapatan dari mess Jambi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi ketinggian
2. Harga kamar yang ditetapkan kemahalan, sehingga membuat masyarakat Jambi berpaling ke penginapan lain yang lebih murah, apalagi di sekitar mess Jambi banyak ditemui penginapan dengan harga miring, karena persaingan bisnis penginapan di Jakarta cukup ketat.
3. Kebijakan penggunaan uang negara dalam hal dinas luar, sehingga banyak pejabat dan ASN Pemrop.Jambi yang dinas ke Jakarta tidak menggunakan wisma Jambi sebagai tempat bermalam.
4. Kebijakan Kepala Daerah Provinsi Jambi yang menggratiskan masyarakat Jambi yang tidak mampu yang sedang berobat di Jakarta bermalam di mess Jambi.

Kemungkinan-kemungkinan ini perlu dikaji lebih matang lagi kedepan, jika mengharapkan kontribusi mess Jambi dalam meningkatkan PAD Jambi. Tujuan dari dibangunnya mess Jambi disamping memberikan kontribusi kepada PAD Jambi (*orientasi profit*), juga *orientasi social* yaitu membantu atau mengurangi beban

masyarakat Jambi yang tidak mampu di Jakarta, khususnya yang sedang berobat di Jakarta.

Sampai tanggal 31 Desember 2018 persentase realisasi pencapaian target pendapatan daerah Jambi dari mess Jambi di Jakarta sebesar 51,70 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pengelola mess Jambi, agar realisasi pencapaian target pendapatan daerah Jambi dari mess Jambi di Jakarta ke depan bisa mencapai sebesar 100 persen.

Disamping itu rata-rata kegiatan promosi seni dan budaya daerah Jambi yang dilaksanakan di anjungan Jambi Taman Mini sebanyak 5 (lima) kali, dengan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara sebanyak 7.300 orng per tahun atau rata –rata 20 orang.

Penghargaan yang diterima anjungan Jambi TMII dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12. Penghargaan yang diterima Anjungan Jambi TMII, dari tahun 2015-2018

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan Diterima	Pejabat Pemberi Penghargaan
1.	Juara III Lomba Keindahan, Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan Kelompok Anjungan Daerah Wilayah Sumatera	9 April 2015	Direktur Utama TMII, dalam rangka HUT ke 40 TMII 20 April 2015
2.	Penyaji Unggulan Cita Rasa Boga Swarna Dwipa Wilayah Sumatera	April 2015	Direktur Utama TMII, dalam rangka HUT ke 41 TMII 20 April 2016
3.	Peran serta dalam pengiriman Tim Kesenian pada kegiatan “ Parade Teater Daerah ke 7, bertempat di Sasono Langen Budoyo TMII	13 Juli 2018	Direktur Utama TMII

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian visi, misi dan tujuan organisasinya sangat tergantung dan terikat kepada unsur-unsur lingkungan internal dan eksternalnya. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi maka analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (analisis SWOT) perlu dilakukan. Analisis SWOT ini juga berguna untuk mengetahui dimana keberadaan organisasi pada saat ini (*Where are now?*) yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar dalam pemilihan strategi dan kebijakan.

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

- ❖ Adanya Perda Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
- ❖ Struktur organisasi pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi telah terisi oleh pejabat struktural dan staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam pemberian pelayanan umum.
- ❖ Aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- ❖ Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas—tugas Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- ❖ Hubungan kerja dan koordinasi antar bagian masih cukup lemah.
- ❖ Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

- ❖ Pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan masih lemah.
- ❖ Masih terbatasnya personil yang profesional dalam melaksanakan tugas.
- ❖ Pemahaman terhadap aturan perundang-undangan masih rendah.
- ❖ Masih kurangnya informasi/ data akurat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- ❖ Sistem dan birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi yang mulai tertata dengan baik.
- ❖ Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas tinggi dalam rnenciptakan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
- ❖ Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- ❖ Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan SKPD lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stake holders*)

b. Faktor Tantangan (*Threat*)

- ❖ Semakin meningkatn ya pengawasan/ kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
- ❖ Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat sehingga menjadi lebih kritis.
- ❖ Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya permasalahan yang dihadapi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama ini adalah ;

- 1) Kemampuan SDM Aparatur perlu segera ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya produktivitas/kinerja di masa mendatang.
- 2) Sarana dan Prasarana sudah bagus hanya khusus untuk peningkatan pelayanan mess masih belum optimal untuk memberikan pelayanan tambahan sarapan pagi serta perlengkapan keperluan kamar dan kamar mandi(teh,gula,kopi,odol, sikat gigi, sabun mandi, sandal dll) yang semakin baik dan berkualitas.
- 3) Perlu pengadaan Aplikasi E –Office untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan mess tentang daftar penginap dan keuangan serta kesediaan kamar kosong secara online.
- 4) Dalam rangka promosi potensi Jambi melalui memperkenalkan seni budaya dan objek wisata di Jambi serta promosi investasi perlu adanya kesepakatan dan kerjasama kembali antara Pemerintah Provinsi dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota serta pihak swasta.
- 5) Semakin banyaknya competitor, baik wisma maupun hotel sekitar mess Jambi yang memberikan harga relative murah dan fasilitas yang cukup lengkap . Untuk itu sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi tentang keadaan Mess Jambi di Jalan Cidurian. No.15-17 untuk lebih meningkatkan jumlah orang yang menginap dan Pencapaian target dengan melakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap ketetapan harga standard dan vip kamar di mess Jambi.
- 6) Bangunan Asrama Mahasiswa Jambi di Kwitang Jakarta Pusat sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam perbaikan dan pembaruan

dikarenakan kondisi bangunannya banyak yang bocor.

7) Hal yang perlu pula mendapat perhatian dan dukungan adalah penyediaan dana untuk menunjang operasional Badan Peghubung Daerah Provinsi Jambi yang konsisten dan berkelanjutan.

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serta dukungan adalah memperbaiki fasilitas Sarapan Pagi dan Kelengkapan Kamar serta kamar mandi serta pengadaan E-Office system informasi untuk transparansi Pendapatan Mess . E-Office untuk pelaksanaan tufoksi administrasi perkantoran Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Di dalam perumusan Rencana Strategis, penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan perlu dilakukan. Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa Visi Provinsi Jambi yakni Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi MASA Bakti Tahun 2016-2021 yaitu

***“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman,
Tangguh, Adil dan Sejahtera 2016-2021”***

Tertib : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang profesioal dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

- Unggul** : Menggambarkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Nyaman** : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.
- Tangguh** : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap goncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- Adil** : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Sejahtera** : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosail, ekonomi, politik dan budaya

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan**

- kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk-produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
 5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
 6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi di atas, maka Tujuan pembangunan daerah provinsi Jambi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021), sebanyak 9 (sembilan) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis.
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah.
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan.
7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastuktur umum.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun Sasaran pembangunan daerah provinsi Jambi tahun 2016-2021, sebanyak 21 (dua puluh satu) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah.
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama.
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan hukum.
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah.
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP).
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
12. Meningkatnya ketahanan pangan.
13. Meningkatnya indeks pertanian pada lahan tanaman pangan.
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian.
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi.
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal.
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.
19. Menurunnya angka kemiskinan.
20. Menurunnya angka pengangguran.
21. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk.

3.3 TELAAHAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

3.3.1 PENGERTIAN RENSTRA

Renstra (Rencana Strategis) ialah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021 yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 merupakan dokumen Perubahan Program Kerja Badan Penghubung yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021, yang mengacu pada Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yang dihasilkan melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada.

Oleh karena Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu Organisasi Perangkat daerah (OPD) di bawah Pemerintah Provinsi Jambi, maka Visi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yakni ;

***“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman,
Tangguh, Adil dan Sejahtera 2016-2021”***

Sedangkan Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah Misi 1 dari 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu :

***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,
akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik”***

3.3.2. HUBUNGAN PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN

Adapun hubungan Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun yang memuat Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN.
3. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBD, dan APBN, yang mengalami perubahan.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.
5. Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan

dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, yang mengalami perubahan.

6. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), berfungsi sebagai rancangan dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, yang mengalami perubahan akhir.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

3.3.3. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenai kondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program. Faktor penentu keberhasilan disini antara lain :

1. Tersedianya sumber daya aparatur yang mempunyai komitmen tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 tahun 2016 serta kebijakan otonomi daerah yang didukung pendanaan yang cukup memadai guna pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menjadi faktor penentu keberhasilan mewujudkan visi dan misi organisasi.
2. Dukungan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, Perda Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 akan mampu menjawab/ mengatasi tantangan kondisi eksternal dimana pengawasan/

kontrol dari berbagai elemen masyarakat semakin tinggi dan pola pikir yang semakin kritis.

3. Adanya peluang otonomi daerah dan tata kelola birokrasi dan hubungan kerjasama antar instansi yang semakin baik akan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada serta tantangan-tantangan yang muncul dalam mencapai visi dan misi organisasi.

3.4 TELAAHAN RTRW DAN KLHS PROVINSI JAMBI

Telaahan RTRW dan KLHS Provinsi Jambi berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, menyatakan Permasalahan Pembangunan, yang menyangkut Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari ;

1. Kinerja aparatur pemerintah daerah masih rendah yang salah satunya disebabkan oleh sistem penilaian kinerja aparatur belum efektif dan efisien.
2. Penerapan e – Government system dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan belum berjalan maksimal.
3. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah terutama dalam mentaati peraturan Daerah karena materi muatan peraturan daerah masih terdapat kelemahan normatif, ketaatan masyarakat dan pengawasannya juga rendah.
4. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan masih terbatasnya karena respon sosial yang rendah dan penyebaran informasi publik di daerah juga rendah.
5. Kualitas pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dan BLUD belum memuaskan.
6. Ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih besar karena Potensi PAD belum optimal digali. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selama tahun 2015 mengalami peningkatan, tetapi bila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih jauh lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat. Setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, tetapi secara nominal bantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini mencerminkan bahwa sumber pembiayaan daerah ini

masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal Akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, belum berkembangnya e - government system dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing. Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.
3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.

4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) belum optimal dan kurang Mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.
- 5 Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
- 6 Adanya kesenjangan ekonomi ditandai tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Letak Jambi secara geografis sangat strategis dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera (Provinsi Sumsel, Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu) karena dapat menjadi pintu gerbang keluar dan Masuknya barang, jasa dan orang dari dan ke Batam, Malaysia dan Singapura serta dari provinsi lain. Peran Jambi ke depan akan semakin strategis sebagai bagian dari poros maritim dunia, pemberlakuan pasar bebas Asean (AFTA) dan Asean – China (ACFTA) serta Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
8. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada Pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
- 9 Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga Keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi Hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keaneka ragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan Benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus*

sumatraensis), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopalus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebunga. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

10. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.
11. Penyelesaian Batas Provinsi Jambi dan Provinsi berbatasan merupakan agenda yang harus mendapat perhatian untuk pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terkait dengan upaya pembangunan wilayah perbatasan yang sampai saat ini masih belum optimal.

3.5.2 Penentuan Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Berangkat dari Isu – isu strategis yang harus menjadi perhatian Provinsi Jambi dalam lima tahun kedepan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Isu-isu Strategis Tugas dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Cross Cutting Issue

- a. Kemampuan SDM Aparatur perlu segera ditingkatkan untuk mendorong meningkatnya produktivitas/kinerja di masa mendatang.
- b. Sarana dan Prasarana sudah bagus hanya khusus untuk peningkatan pelayanan mess masih belum optimal untuk memberikan pelayanan tambahan sarapan pagi serta perlengkapan keperluan kamar dan kamar mandi(teh,gula,kopi,odol, sikat gigi, sabun mandi, sandal dll) yang semakin baik dan berkualitas.

- c. Perlu pengadaan Aplikasi E –Office untuk pelaksanaan pengelolaan pendapatan mess tentang daftar penginap dan keuangan serta kesediaan kamar kosong secara online.
- d. Dalam rangka promosi potensi Jambi melalui memperkenalkan seni budaya dan objek wisata di Jambi serta promosi investasi perlu adanya kesepakatan dan kerjasama kembali antara Pemerintah Provinsi dengan 9 Kabupaten dan 2 Kota serta pihak swasta.

2. Isue Sektoral

- a. Keadaan Mess Jambi di Jalan Cidurian. No. 15-17 sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih meningkatkan jumlah orang yang menginap dan pencapaian target perlu dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap ketetapan harga standard dan VIP kamar di mess Jambi, mengingat semakin banyaknya competitor baik wisma maupun hotel sekitar mess yang memberikan harga relative murah dan fasilitas yang cukup lengkap .
- b. Perlu penegasan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jambi melalui ketetapan atau edaran bagi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jambi untuk memaksimalkan fasilitas mess Jambi jika melakukan Dinas di Jakarta menginap di mess Jambi yang tujuannya adalah untuk menyerap PAD kembali ke Kas daerah.
- c. Keadaan Asrama Mahasiswa Jambi di Kwitang Jakarta Pusat sangat perlu perhatian Pemerintah Provinsi Jambi dalam perbaikan dan pembaruan dikarenakan bangunan yang banyak bocor serta pemeliharaan yang signifikan, dan adanya rencana pengalihan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai rumah singgah yang dapat menampung masyarakat Jambi di Jakarta, focus aktivitas sosial kemasyarakatan.
- d. Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sangat membantu dalam proses pelayanan umum pemerintah dan masyarakat daerah Jambi baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya maupun dari Provinsi, Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi.
- e. Hal yang perlu pula mendapat perhatian dan dukungan adalah penyediaan dana untuk menunjang operasional Badan Peghubung Daerah Provinsi Jambi.

Dari hal tersebut tadi, yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian serta dukungan adalah **meperbaiki fasilitas Sarapan Pagi dan**

Kelengkapan Kamar serta kamar mandi serta pengadaan E-Office system informasi untuk transparansi Pendapatan Mess . E-Office untuk pelaksanaan tufoksi administrasi perkantoran Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Berangkat dari Misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik”

maka Tujuan pembangunan daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah Tujuan 1 dari 9 (sembilan) Tujuan pembangunan daerah provinsi Jambi Tahun 2016-2021, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas”

4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Sasaran jangka menengah Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Pengelolaan Mess.
3. Meningkatnya Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi.

Untuk jelasnya Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target Capaian dan Kondisi Akhir 2021 yang diinginkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, adalah sebagaimana tertera pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Target Capaian dan Kondisi Akhir 2021 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No.	Sasaran	IKU	Target Capaian						Kondisi Akhir 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.IKM	75	75	75	80	80	80,5	80,5
		2.Nilai AKIP	60	60	60	60,05	60,05	60,10	60,10
		3.Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Pengelolaan Mess	Persentase Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/PAD	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,52	1,52
3.	Meningkatnya Seni Budaya Daerah, Promosi dan Informasi	1.Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII	0,9	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1
		2.Persentase Peningkatan Kunjungan Provinsi Jambi	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,51	0,51

Sumber : Bapegdaprov. Jambi . Data Diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Sebagai langkah lanjut dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan suatu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran serta pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta tahun 2016-2021.

Adapun strategi dalam pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah “ ***Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi*** “, dengan jalan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kearsipan oleh aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
2. Peningkatan sarana dan prasarana kantor.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah.
4. Meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian dinas (seragam).
5. Mengembangkan system Pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel.
6. Mengembangkan sistem pelaporan pencapaian kinerja yang akuntabel.
7. Peningkatan kemampuan aparatur dalam keprotokolan dan pelayanan mess.
8. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
9. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Promosi Potensi Jambi.

5.2. ARAH KEBIJAKAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI

Arah kebijakan pembangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5.1. Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016-2021.**

Tahun	Arah Kebijakan
2016	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2017	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2018	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2019	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2020	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
2021	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi

Sumber : Bapedgapro. Jambi

Strategi dan arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tersebut, dijabarkan kembali dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program yang mendukung terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran serta pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Adapun kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 sebanyak 9 (sembilan) kebijakan yaitu ;

- 1.Menyediakan pelayanan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan Berkualitas.
- 2.Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja Organisasi.
- 3.Memberikan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah yang Berkualitas.
- 4.Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya agar pegawai semakin disiplin dalam berpakaian.

5. Menerapkan 47system pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
6. Menerapkan 47system pelaporan pencapaian kinerja yang transparan.
7. Menyelenggarakan pelatihan, monitoring dan evaluasi keprotokolan dan pelayanan mess (service exelent).
8. Mengembangkan pengelolaan barang daerah secara efektif, efisien dan Fungsional.
9. Menyelenggarakan promosi potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional.

Untuk jelasnya Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2.

**Tabel 5.2. Strategi dan Kebijakan Badan Penghubung Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2016-2021**

No.	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan dan kearsipan oleh aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Menyediakan pelayanan ketatausahaan dan kearsipan kantor yang modern dan berkualitas
2	Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Menyediakan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan mendukung kinerja organisasi
3	Peningkatan kualitas pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah	Memberikan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang berkualitas
4	Meningkatkan disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian dinas (seragam)	Menyediakan pakaian dinas beserta kelengkapannya agar pegawai semakin disiplin dalam berpakaian
5	Mengembangkan system Pengelolaan keuangan yang kredibel dan akuntabel	Menerapkan 47system pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien
6	Mengembangkan 47sistem pelaporan pencapaian kinerja yang akuntabel	Menerapkan 47sistem pelaporan pencapaian kinerja yang transparan
7	Peningkatan kemampuan aparatur dalam keprotokolan dan pelayanan mess	Menyelenggarakan pelatihan, monitoring dan evaluasi keprotokolan dan pelayanan mess (service exelent)
8	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan barang daerah	Mengembangkan pengelolaan barang daerah secara efektif, efisien dan fungsional
9.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Promosi Potensi Jambi	Menyelenggarakan promosi potensi Jambi di Tingkat Nasional dan Internasional.

Sumber : Bapegdaprov. Jambi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan. Sedangkan kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilakukan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

Selaras dengan strategi dan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, maka Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2016-2021 sesuai dengan Perubahan RPJMD Propinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 10 (sepuluh) Program dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 14 (empat belas) kegiatan, yaitu ;
 - 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ;
 - 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
 - 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
 - 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor;
 - 10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
 - 11)Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ;
 - 12)Kegiatan rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
 - 13)Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah ;
 - 14)Kegiatan Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum ;

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu ;
 - 1) Kegiatan Pengadaanb Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) ;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor ;
 - 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur ;
 - 4) Kegiatan Pengadaan Komputer ;
 - 5) Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah satu lantai dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta ;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional ;
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah di Jakarta, dengan Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.
7. Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi.
8. Program Fasilitasi Hubungan Daerah, Lembaga dan Kemasyarakatan,
Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik, dengan 8 (delapan) kegiatan, yaitu ;

- 1)Kegiatan Hibah Jasa ke Masyarakat ;
- 2)Kegiatan Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi ;
- 3)Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik ;
- 4)Kegiatan Rakor Panguyuban Masyarakat Jambi ;
- 5)Kegiatan Penyusunan Data Base Masyarakat Jambi se-abodetabek;
- 6)Kegiatan Jambi Investment Information (JII) ;
- 7)Kegiatan Temu Daerah Perempuan Jambi;
- 8)Kegiatan Workshop Pemuda Jambi ;
- 9.Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah, Promosi dan Infomasi.
- 10.Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta, dengan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah.

6.2.PENDANAAN

Pendanaan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2016-2021 bersumber dari APBD Provinsi Jambi . Untuk jelasnya dana yang diperlukan per masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 2. Kelompok sasaran dan pendanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis , sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/ kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang. Indikator kinerja pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Penetapan Indikator kinerja dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja berkenaan. Tabel 7.1. berikut menunjukkan Penetapan Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi.

Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode Renstra (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	IKM	Kategori/ Kriteria berdasar kan Mutu/Ra nking	75	75	75	75	80	80	80,5	80,5
2	Nilai AKIP	Kategori/ Kriteria berdasar kan Mutu/Ra nking	60	60	60	60	60,05	60,05	60,10	60,10
3	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Kontribusi Mess Jambi/ PAD	%	1,45	1,45	1,45	1,45	1,5	1,5	1,52	1,52
5	Persentase Peningkat an Kunjungan	%	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	1,1	1,1

	Wisata ke Anjungan Jambi TMII									
6	.Persentas e Peningka tan Kunjungan Provinsi Jambi	%	0,49	0,49	0,49	0,49	0,5	0,5	0,51	0,51

Sumber : Bapegdaprov. Jambi . Data Diolah

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Oleh karena itu Perubahan Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi ini merupakan :

1. Dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.
2. Bahan acuan pertanggungjawaban Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam penyusunan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Demikian Perubahan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini disusun, semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
KEADAAN 31 DESEMBER 2018

NO	NAMA	NIP	TMT CPNS	PANGKAT		JABATAN			UNIT KERJA	MASA KERJA		DIKLAT JABATAN			PENDIDIKAN FORMAL			JENIS KELAMIN & USIA			Catatan Mutasi Pegawai	KET
				Golongan / Ruang	TMT	NAMA JABATAN	ESL	TMT		Th	Bln	NAMA DIKLAT	Th	Bulan	NAMA	Th	Tk. Ijazah	JK	Th	Bln		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ir NILA RIZAL NOOR,M,Si	19640109 199003 2 003	10/01/03	Pembina TK. I (IV/b)	01/10/2007	Pelaksana	-	-	Bdn Penghubung	17	07	-	-	-	Magister IPB	1998	S2	P/54	1964	Jan		
2	SYURNETTI,M.Si	19620123 198903 2 005	31/1/1989	Pembina (IV/a)	01/10/2013	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	26	10	-	-	-	S2	1986	S2	P/56	1962	Maret		
3	MURSIDA, S.Pd	19680405 199403 2 006	01/03/94	Pembina (IV/a)	01/10/2012	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	16	07	-			SI Unja		S1	P/56	1968	Jan		
4	PRIMARANI PANGIDARAN, SE.ME	19720415 199703 2 006	10/01/09	Pembina (IV/a)	01/10/2013	Kasubbag Tata Usaha	IV	08/03/10	Bdn Penghubung	16	07	Adum	2000	Agus	Magister UI	2004	S2	P/46	1972	Apr		
5	REFLI,SH	19690404 199103 1006	10/01/03	Penata TK. I (III/d)	01/04/2014	Kepala Badan	III	21/07/11	Bdn Penghubung	18	01	-			SI	1996	SI	L/49	1969	Apr		
6	WIKA EFIYANTI,SH	19630410 199403 2 003	04/01/06	Penata TK. I (III/d)	01/04/2006	Kasubbid Seni Dan Budaya	IV	-	Bdn Penghubung	12	01	Adumla	2001	April	Unja Fh	1988	S1	P/55	1963	Apr		
7	ALFI SAFITRA,SH	19651219 199303 1 006	01/4/05	Penata TK. I (III/d)	01/04/2005	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	01	Adum	2000	Maret	Univ Jambi	1990	SI	L/52	1965	Des		
8	Hj.IRIANI GUMANTI,S.Pi	19640822 198903 2 003	01/03/89	Penata TK. I (III/d)	01/10/2008	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	29	07	Diklat PIM III	2005	agus	Unbari	1997	S1	P/54	1964	Ags		
9	Ir. ELVARITA JUWITA	19670716 199803 2 002	04/01/10	Penata TK. I (III/d)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	01	Adum	2005	Juli	Univ Jambi	1992	S1	P/50	1967	Jul		
10	Drs. AMRULSYAH	19700107 199101 1 001	01/01/91	Penata TK. I (III/d)	01/10/2011	Kasubbid Protokol dan HAL	IV	-	Bdn Penghubung	16	00	Diklat PIM III	2014	Des	IIP Depdagri	1999	SI	L/48	1970	Jan		
11	HANI'A, SE	19720409 199903 2 007	04/01/07	Penata TK. I (III/d)	01/04/2011	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	01	Adum	2005	Juli	Upancas	1995	S1	P/46	1972	Apr		
12	HUSAINI SALAM PESSY,SE	19610828 198903 1 007	01/04/09	Penata TK. I (III/d)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	28	00	-	-	-	Unbari	2004	S1	L/56	1961	Ags		
13	DENY HUSNI,S.Sn	19681116 199303 1 006	01/03/93	Penata TK. I (III/d)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	28	01	Diklat PIM IV	2005	agus	STSI	2003	S1	L/49	1958	Jun		
14	HERAWATI,SP	19670310 198703 2 006	03/01/87	Penata TK. I (III/d)	01/10/2015	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	26	02	-	-	-	UMBARI	2011	S1	P/51	1967	Maret		
15	NENSI ITARI,S,Kep	19721030 199303 2 005	04/01/10	Penata TK. I (III/d)	01/10/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	20	07	-	-	-	STIEKES	2008	SI	P/46	1972	Okt		
16	ZULFIKAR ABDULAH ,SE	19831229 200903 1 003	03/01/09	Penata (III/c)	01/04/2017	Kasubbid Mess dan Asset	IV	-	Bdn Penghubung	08	01	-	-	-	UPN	2008	S1	L/34	1983	Des		
17	MEZI ARSENTO S,IP,M,AP	19881015 200701 1 002	01/01/07	Penata (III/c)	01/04/2015	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	05	06	-	-	-	STIA-LAN BDG	2013	S2	L/29	1988	Okt		
18	SUDARWANI,SIP	19750204 199403 2 002	04/01/09	Penata (III/c)	01/04/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	19	01	-	-	-	S1	2010	S1	P/43	1975	Feb		
19	RURIKA DINA SARI,SH	19800225 201001 2 003	01/01/10	Penata (III/c)	01/04/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	13	03	-	-	-	UII	2002	S1	P/38	1980	Feb		
20	FAHMI RASID,SE,MAP	19800314 200701 1 001	04/01/10	Penata (III/c)	01/03/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	08	06	-	-	-	STIA LAN JKT	2014	S2	L/38	1980	Maret		
21	SUSILAWATI ,SE	19670331 201001 2 001	01/01/10	Penata (III/c)	01/04/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	03	-	-	-	Unkris	1992	S1	P/51	1967	Maret		
22	RUSSY SHERISKA,ST	19840317 200902 2 011	01/02/09	Penata (III/c)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	06	00	-	-	-	ST	2007	S1	P/34	1984	Maret		
23	DAH LISTIANI.S.A.B.M.A.B	19860510 201101 2 008	01/01/11	Penata (III/c)	01-04-2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	07	03				UNIBRAW	2010	S2	P/32	1986	Mei		
24	LELA KENCANA,SE	19660131 199103 2 004	05/01/05	Penata (III/c)	01/10/2018	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	17	07	-	-	-	S1	2014	S1	P/52	1966	Jan		
25	SENTHOT ADIMULYONO	19620123 198603 1 004	10/01/06	Penata Muda TK. I (III/b)	01/10/2010	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	18	10	Peng Keu Daerah	1994	-	SMA	1989	SMA	L/56	1963	Jan		
26	ROCHANI	19710529 199203 2 003	01/04/09	Penata Muda TK. I (III/b)	01/04/2013	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	18	00	-	-	-	SMA	1988	SMA	P/47	1971	Mei		
27	BUNYANAH	19671026 199103 2 005	01/04/08	Penata Muda TK. I (III/b)	01/04/2013	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	17	01	-	-	-	SMA	1986	SMA	P/50	1967	Okt		
28	AMDRIYANTO,SE	19820119 201101 1 006	02/01/11	Penata Muda TK. I (III/b)	-	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	-	-	-	-	-	STIE JAMBI	2004	SI	L/36	1982	Jan		
29	WITA GUSTINA, SPd	19760811 201212 2 001	01/12/12	Penata Muda TK. I (III/b)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	03	-	-	-	S1	-	S1	P/41	1976	Ags		
30	HENDRA SETIAWAN,ST	19810703 201101 1 001	01/01/11	Penata Muda TK. I (III/b)	01/04/2014	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	04	03	-	-	-	UMB	2007	S1	L/36	1981	Jul		
31	DEWYNDA RESTU AMELYA,S.Pd	19860720 200902 2 003	01/02/09	Penata Muda TK. I (III/b)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	07	02	-	-	-	Unbari	2008	S1	P/31	1986	Jul		
32	M HIDAYAT	19730930 200701 1 002	01/01/07	Penata Muda (III/a)	01/10/2014	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	-	-	-	-	-	S1	-	S1	L/44	1973	Sep		
33	NUR ASYIAH,Amd	19780423 200312 2 003	01/04/09	Penata Muda (III/a)	01/10/2013	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	04	-	-	-	AKK JOGJA	2003	D3	P/40	1978	Apr		
34	YANTI RUSMIYATI	19821206 200901 2 002	01/01/09	Penata Muda (III/a)	01/04/2015	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	07	01	-	-	-	STIE TRIBUANA	2014	S1	P/35	1982	Des		
35	IMELDA DEWI KARTINI	19680418 199203 2 003	10/01/04	Pengatur (II/d)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	22	04	-	-	-	SMP	1985	SMP	P/50	1968	Apr		

NO	NAMA	NIP	TMT CPNS	PANGKAT		JABATAN			UNIT KERJA	MASA KERJA		DIKLAT JABATAN			PENDIDIKAN FORMAL			JENIS KELAMIN & USIA			Catatan Mutasi Pegawai	KET
				Golongan / Ruang	TMT	NAMA JABATAN	ESL	TMT		Th	Bln	NAMA DIKLAT	Th	Bulan	NAMA	Th	Tk. Ijazah	JK	Th	Bln		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36	CAHYA	19550419 199403 1 003	04/01/07	Pengatur (II/c)	01/10/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	19	07	-	-	-	SMP	1981	SMP	L/63	1965	Sep		
37	AKHMAD GULAM	19671105 200801 1 001	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	03	-	-	-	SMA	1987	SMA	L/50	1967	Nop		
38	COKRO WINOTO	19691119 200801 1 002	01/04/12	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	03	-	-	-	SMA	1988	SMA	L/48	1969	Nov		
39	HIDAYAT ABDULLAH	19700924 200801 1 001	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/10/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	18	05	-	-	-	SMA	1991	SMA	L/47	1970	Sep		
40	HERMAN	19721214 200701 1 003	01/01/07	Pengatur (II/c)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	11	09	-	-	-	SMA	1991	SMA	L/45	1972	Des		
41	TRINI DWI SRI MULASIH	19750829 200801 2 002	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	15	03	-	-	-	SMEA	1995	SMEA	P/42	1975	Ags		
42	DONI SETIAWAN	19750924 200801 1 001	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	15	03	-	-	-	SMEA	1994	SMEA	L/42	1975	Sep		
43	BUDI KURNIAWAN	19790827 200801 1 001	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	11	00	-	-	-	SMU	1998	SMU	L/38	1979	Ags		
44	MUHAMMAD IKHWAN	19821213 200801 1 001	01/01/08	Pengatur (II/c)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	11	-	-	-	SMK	2002	SMK	L/35	1982	Des		
45	BAYU DWI HANGGORO	19781207 200901 1 008	01/01/09	Pengatur (II/c)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	13	09	-	-	-	STM	1999	STM	L/39	1978	Des		
46	MUHAMMAD ALI	19640923 201212 1 002	01/12/12	Pengatur Muda TK. I (II/b)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	03	-	-	-	SMA	1985	SMA	L/53	1964	Sep		
47	SUWARDI	19790214 200801 1 001	01/01/08	Pengatur Muda TK. I (II/b)	01/10/2008	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	16	06	-	-	-	Paket C	2012	Paket C	L/39	1979	Feb		
48	HERMAN	19790810 201212 1 002	01/12/12	Pengatur Muda TK. I (II/b)	01/04/2011	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	07	12	-	-	-	SMK	2000	SMK	L/38	1979	Ags		
49	MUHAMMAD SODIQ	19811217 201212 1 002	01/12/12	Pengatur Muda TK. I (II/b)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	03	-	-	-	SMU	2000	SMU	L/36	1981	Des		
50	MAISARAH	19780604 201212 2 004	01/12/12	Pengatur Muda TK. I (II/b)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	03	-	-	-	SMA	-	SMA	P/40	1978	Jun		
51	SUPRIYONO	19630307 198909 1 002	04/01/06	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2007	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	11	07	-	-	-	SD	1976	SD	L/55	1963	Maret		
52	SUHADA	19630425 199203 1 004	04/01/08	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2008	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	10	01	-	-	-	SD	1985	SD	L/55	1963	Apr		
53	NALIH	19621211 199401 1 001	04/01/06	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2011	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	11	03	-	-	-	SD	1988	SD	L/55	1962	Des		
54	HIDAYAT	19630513 199203 1 004	04/01/04	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2008	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	10	01	-	-	-	SD	1989	SD	L/55	1963	Mei		
55	DIAH AGUSTI	19900815 201101 2 001	-	Pengatur Muda (II/a)	-	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	-	-	-	-	-	SMA	-	SMA	P/27	1990	Ags		
56	HANAFI	19700414 200801 1 002	01/01/08	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	15	00	-	-	-	MTS	2003	MTS	L/48	1970	Apr		
57	AGMAN	19830515 200901 1 016	01/01/09	Pengatur Muda (II/a)	01/04/2015	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	07	11	-	-	-	SMA	2013	SMA	L/35	1983	Mei		
58	ASNAWI	19820226 200801 1 001	01/10/10	Juru TK. I (I/d)	10/16/2014	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	12	09	-	-	-	SMP	2006	SMP	L/36	1982	Feb		
59	SUWITNYO	19681003 200901 1001	01/01/09	Juru TK. I (I/d)	01/10/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	18	09	-	-	-	SD	1987	SD	L/49	1968	Okt		
60	SUJARWO	19700810 201212 1 003	01/12/12	Juru TK. I (I/d)	01/04/2017	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	03	-	-	-	SMP	1986	SMP	L/47	1970	Ags		
61	ANNISA PUSPA JUWITA	19830604 201101 2 002	01/01/11	Juru TK. I (I/d)	-	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	-	-	-	-	-	SMA		SMA	P/35	1983	Jun		
62	DESY YANTI	19781225 200801 2 004	01/01/08	Juru TK. I (I/b)	01/04/2016	Fungsional Umum	-	-	Bdn Penghubung	14	03	-	-	-	SD	2001	SD	P/39	1978	Des		

Jakarta, 31 Desember 2018

KEPALA BADAN,

REFLI.SH

Penata TK. I

NIP 19690404 199103 1006

Daftar : REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : JANUARI 2019

1. BERDASARKAN GOLONGAN RUANG

NO	NAMA SKPD	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH	
		GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV						
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	e		JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22	23
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	-	1	-	4	5	7	5	10	1	23	3	7	9	11	30	3	1	-	-	-	4	62
	a. OPD (Induk)																						
	b. UPTB/UPTD																						
TOTAL		-	1	-	4	5	7	5	10	1	23	3	7	9	11	30	3	1	-	-	-	4	62

Jakarta, Januari 2019

KEPALA BADAN,



REFLI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19690404 199103 1 006

DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN
UNIT KERJA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
KEADAAN : BULAN JANUARI 2019

NO	ON GA	LAKI -LAKI								PEREMPUAN								TOTAL
		S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-3	S-2	S-1	D-3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	I. A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	D	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1	4
					-	-	-	-			-	-	-		-	-		0
	II. A	-	-	-	-	1	1	4	6	-	-	-	-	1		-	1	7
	B	-	-	-	-	4		-	4	-	-	-	-	1		-	1	5
	C	-	-	-	-	8	1	-	9	-	-	-		1	-	-	1	10
	D	-	-	-	-		-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	1	1
				-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	III. A	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1		-	-	2	3
	B	-	-	2	-	1	-	-	3	-	-	2	-	2	-	-	4	7
	C	-	2	1	-	-	-	-	3	-	1	5	-	-	-	-	6	9
	D	-	-	5	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-	6	11
				-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		0
	IV. A	-	-	-	-	-	-	-	0	-	2	1	-	-	-	-	3	3
	B	-		-	-	-	-	-	0	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	C	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		0
	D	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		0
	JUMLA	0	2	9	0	14	4	5	34		4	15	1	6	1	1	28	62

Jakarta, Januari 2019

KEPALA BADAN,



REFLI.SH

Penata TK. I

NIP 19690404 199103 1 006

Daftar : REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : JANUARI 2019

3. BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

NO	UNIT KERJA	LAKI - LAKI									JML	PEREMPUAN									JML	TOTAL
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	-	2	9	-	-	-	14	4	5	34	-	4	15	1	-	-	6	1	1	28	62
	a. OPD (Induk)																					
	b. UPTB/UPTD																					
JUMLAH		-	2	9	-	-	-	14	4	5	34	-	4	15	1	-	-	6	1	1	28	62

Jakarta, Januari 2019
KEPALA BADAN,



REFLI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19690404 199103 1 006

Daftar REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : JANUARI 2019

2. BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

NO	NAMA SKPD	GOLONGAN RUANG												JUMLAH
		GOLONGAN I			GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	3	2	5	19	4	23	12	18	30	-	4	4	62
	a. OPD (Induk)													
	b. UPTB/UPTD													
TOTAL		3	2	5	19	4	23	12	18	30	-	4	4	62

Jakarta, Januari 2019

KEPALA BADAN,



REFLI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19690404 199103 1 006

Daftar REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : DESEMBER 2018

2. BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

NO	NAMA SKPD	GOLONGAN RUANG												JUMLAH
		GOLONGAN I			GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	3	2	5	19	4	23	12	17	29	-	4	4	61
	a. OPD (Induk)													
	b. UPTB/UPTD													
TOTAL		3	2	5	19	4	23	12	17	29	-	4	4	61

Jakarta, Desember 2018

KEPALA BADAN,



REFLI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19690404 199103 1 006

Daftar : REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : JANUARI 2019

4. BERDASARKAN JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN

NO	UNIT KERJA	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI	5	0	57	62
	a. OPD (Induk)				
	b. UPTB/UPTD				
JUMLAH		5	0	57	62

Jakarta, Januari 2019

KEPALA BADAN,



REFLI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19690404 199103 1 006

Daftar : REKAPITULASI JUMLAH PNS
DI LINGKUP BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAMBI
KEADAAN : JANUARI 2019

5. BERDASARKAN ESELONERING DAN JENIS KELAMIN

NO	UNIT KERJA	ESELON I						ESELON II						ESELON III						ESELON IV						TOTAL
		A			B			A			B			A			B			A			B			
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI			-			-			-			-	1		1			-	2	2	4			-	5
	a. OPD (Induk)																									
	b. UPTB/UPTD																									
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	4	-	-	-	5

Keterangan:

Tingkat Pendidikan :	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV / S-1	S-2	S-3	JUMLAH
Eselon I								-
Eselon II								-
Eselon III					1			1
Eselon IV					3	1		4
Eselon V								-
TOTAL	-	-	-	-	4	1	-	5

Jakarta, Januari 2019
KEPALA BADAN,



REFLI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19690404 199103 1 006

LAMPIRAN

FORMAT 4

DAFTAR JUMLAH PNS / PEJABAT BERDASARKAN ESELONERING DAN JENIS KELAMIN
UNIT ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI
KEADAAN : BULAN JULI 2018

NO	GOLONGAN RUANG																								TOTAL
	ES. I						ES. II						ES. III						ES. IV						
	A			B			A			B			A			B			A			B			
	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1													1						3	1					5 Orang

Jakarta, JULI 2018
KEPALA BADAN,



REFLI.SH
Penata TK. I
NIP 19690404 199103 1006

LAMPIRAN 8

DAFTAR JUMLAH PNS BERDASARKAN JABATAN KEPEGAWAIAN
UNIT KERJA **BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH JAMBI**
KEADAAN **JANUARI 2019**

NO	UNIT KERJA	JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN			TOTAL
		JABATAN STRUKTURAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1	BADAN PENGHUBUNG	5		57	62
	PEMERINTAH PROVINSI				
	JAMBI				
					62

Jakarta, Januari 2019

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI



REFLI.SH

Penata TK. I

NIP 19690404 199103 1006

Lampiran 2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan serta Unit Kerja Penanggung Jawab pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Tahun 2016-2021

Urusan Penunjang Lainnya

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penang gung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	NA	100 %	4.131,1	100 %	6.570,07	100 %	6.894,53	100 %	7.250	100 %	7.300	100 %	7.340	100 %	40.699,17	Subbag TU
1.1.Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase Jumlah pengiriman surat	100%	100 %	1,21	100 %	9,95	100 %	33,95	100 %	35	100 %	35	100 %	36	100 %	149,9	Subbag TU
1.2.Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100 %	829,32	100 %	1.161,8	100 %	1.418,16	100 %	1.450	100 %	1.500	100 %	1.500	100 %	7.029,96	Subbag TU
1.3.Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	NA	100 %	50	100 %	21,06	100 %	21	100 %	25	100 %	25	100 %	27	100 %	119,06	Subbag TU
1.4.Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Persentase penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100%	100 %	195,09	100 %	190	100 %	190	100 %	200	100 %	200	100 %	210	100 %	990	Subbag TU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
1.5.Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa adm keuangan	100%	100 %	121,18	100 %	224,47	100 %	277.04	100 %	280	100 %	280	100 %	290	100 %	1.351,51	Subbag TU
1.6.Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	100 %	568,23	100 %	941,95	100 %	1.123,98	100 %	1.125	100 %	1.125	100 %	1.130	100 %	5.445,93	Subbid Aset
1.7.Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100%	100 %	136,23	100 %	135,35	100 %	101,57	100 %	105	100 %	105	100 %	105	100 %	551,92	Subbag TU
1.8.Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100 %	54,99	100 %	45,26	100 %	42.65	100 %	45	100 %	45	100 %	47	100 %	224,91	Subbag TU
1.9.Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100 %	13,66	100 %	45,03	100 %	42,03	100 %	45	100 %	45	100 %	45	100 %	222,06	Subbid Aset
1.10.Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	NA	100 %	8,14	100 %	14,88	100 %	29	100 %	30	100 %	30	100 %	30	100 %	133,88	Subbag TU
1.11.Kegiatan Penyediaan makanan	Persentase Penyediaan makanan dan	100%	100 %	416,80	100 %	808	100 %	839,5	100 %	850	100 %	850	100 %	850	100 %	4.197,5	Subbag TU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
dan minuman	minuman																
1.12.Kegiatan Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	100%	100 %	635,54	100 %	971,70	100 %	755.65	100 %	760	100 %	760	100 %	770	100 %	4.017,35	Subbag TU
1.13.Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi /Teknis Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah (OB)	29	100 %	-	100 %	696	100 %	-	100 %	200	100 %	200	100 %	200	100 %	1.296	Subbag TU
1.14.Kegiatan Transportasi Pegawai Dan Pelayanan Umum	Jumlah Transportasi Pegawai dan Pelayanan Umum (OH)	89 orang (ASN 63 dan honorer 29)	100 %	1.100,71	100 %	1.304,62	100 %	2.020	100 %	2.100	100 %	2.100	100 %	2.100	100 %	9.624,62	Subbid HAL
II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22 unit Kendaraan Dinas Roda 4 dan 14 unit Kendaraan dinas roda 2	100 %	2.053,9	100 %	2.677,867	100 %	2.211,93	100 %	15.260	100 %	14.685	100 %	15.490	100 %	52.378,697	Subbid Aset
2.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 unit Kendaraan Dinas Roda 4	100 %	-	100 %	874,75	100 %	50	100 %	775	100 %	75	100 %	785	100 %	2.559,75	Subbid Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
Operasiona l Roda 4 dan Roda 2	Roda 4 dan Roda 2	dan 14 unit Kendara an dinas roda 2															
2.1.1.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat	22	100 %		1 unit mob il bus micr o dan 1 unit mob il mini bus	874,75	-	-	24	700	27	-	27	700	27	2.274,75	Subbid Aset
2.1. 2.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda Dua Kondisi Baik	14	14		-	-	17	50	17	75	17	75	17	85	17	285	Subbid Aset
2.2.Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100 %	-	100 %	268,117	100 %	403	100 %	550	100 %	600	100 %	600	100 %	2.421,117	Subbid Aset
2.2.1.Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	100 %		100 %	268,117	100 %	403	100 %	200	100 %	250	100 %	250	100 %	1.371,117	Subbid Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penang gung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
2.2.2.Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	100 %	366,35	100 %	-	100 %	-	100 %	350	100 %	350	100 %	350	100 %	1.416	Subbid Aset
2.3. Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Persentase Pengadaan Mebeleur	100%	100 %		1 unit kitc hen set	50	100 %	-	100 %	75	100 %	100	100 %	150	100 %	425	Subbid Aset
2.4.Kegiatan Pengadaan Komputer		12	12		2 unit kom pute r PC dan 1 unit Lap top	45	15	-	15	50	18	50	18	50	20	853	Subbid Aset
	Jumlah komputer																
2.5.Kegiatan Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah Satu lantai Dg luas 400 meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pengadaan 1 (satu) unit Rumah Singgah satu lantai dg luas tanah 400 meter persegi di kawasan Jakarta Pusat, bagi masyarakat Jambi di Jakarta	NA	-		-	-	-	-	1 unit	12.000	1 unit	12.000	1 unit	12.000	1 unit	36.000	Subbid Aset
2.6.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala	Persentase Gedung yang dipelihara	100%	100 %	579,93	100 %	430	100 %	535,93	100 %	550	100 %	600	100 %	600	100 %	2.884,93	Subbid Aset

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
Gedung Kantor																	
2.7.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase Kendaraan Roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	22 roda 4 dan 14 roda 2	22 roda 4 dan 14 roda 2	588,77	24 roda 4 dan 14 roda 2	600	24 roda 4 dan 17 roda 2	679	24 roda 4 dan 17 roda 2	700	27 roda 4 dan 17 roda 2	700	27 roda 4 dan 17 roda 2	725	27 roda 4 dan 17 roda 2	3.499	Subbid HAL
2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100 %	169,78	100 %	200	100 %	272	100 %	280	100 %	280	100 %	290	100 %	1.519	Subbid Aset
2.9.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik	Persentase Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Listrik dan Elektronik	100%	100 %	197,98	100 %	210	100 %	272	100 %	280	100 %	280	100 %	290	100 %	1.382	Subbid Aset
III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	100 %	50,38	100 %	60	100 %	60	100 %	70	100 %	70	100 %	80	100 %	400	Subbag TU
3.1.Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Persentase Pegawai yang terpenuhi pakaian dinasnya	NA	100 %	50,38	100 %	60	100 %	60	100 %	70	100 %	70	100 %	80	100 %	400	Subbag TU
IV.Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur	NA	100 %	45	100 %	30	100 %	22,8	100 %	30	100 %	30	100 %	40	100 %	152,8	Subbag TU

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
Daya Aparatur																	
4.1.Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	Persentase Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	NA	100 %	45	100 %	30	100 %	22,8	100 %	30	100 %	30	100 %	40	100 %	152,8	Subbag TU
V.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	120		120		120		360	Subbag TU
5.1.Kegiatan Pembuatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	120		120		120		360	Subbag TU
VI. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Fasilitas kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah di Jakarta	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	49	100 %	55	100 %	55	100 %	55	100 %	214	Subbid HAL
6.1.Kegiatan Koordinasi Dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Persentase Jumlah koordinasi	100%	100 %	-	100 %	-	100 %	49	100 %	55	100 %	55	100 %	55	100 %	214	Subbid HAL

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
VII.Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Jumlah Informasi	100%	100 %	60	100 %	60	100 %	60	100 %	80	100 %	80	100 %	80	100 %	420	Subbid Promosi dan Informasi
7.1. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Persentase Jumlah Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang disiarkan di media cetak (majalah, leaflet dan kalender) serta media elektronik (Web site BPDP Jambi.com dan spmPronews.com)	100%	100 %	60	100 %	60	100 %	60	100 %	80	100 %	80	100 %	80	100 %	2	Subbid Promosi dan Informasi
VIII.Program Fasilitas Hubungan Daerah, Lembaga Dan Masyarakat Kegiatan Fasilitas / Pembentukan Kerjasama	Persentase Pemerintah Daerah, Lembaga & Masyarakat yang difasilitasi pertahun	100%	100 %	763,83	100 %	134,54	100 %	161,96	100 %	1.220	100 %	1.220	100 %	1.300	100 %	4.092,12	Subbid HAL

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
antar Daerah dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik																	
8.1.Kegiatan Hibah Jasa ke Masyarakat	Persentase hibah yang diberikan ke masyarakat	NA	-	-	100 %	78,92	-	-	-	100	100 %	100	100 %	100	100 %	378,92	Subbid HAL
8.2.Kegiatan Sosialisasi Program dan Hasil Pembangunan Daerah Jambi	Persentase Sosialisasi yang difasilitasi	NA	-	-	100 %	-	100 %	93.48	100 %	150	100 %	150	100 %	200	100 %	593,48	Subbid HAL
8.3.Kegiatan Sarasehan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Persentase Sarasehan yang difasilitasi	100%	100 %	763,83	100 %	55,62	100 %	68,48	100 %	120	100 %	120	100 %	150	100 %	569,72	Subbid HAL
8.4.Kegiatan Rakor Panguyuban Masy.Jambi	Persentase Rakor yang difasilitasi	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	450	Subbid HAL
8.5.Kegiatan Penyusunan Data Base Masyarakat	Data Base Masyarakat Jambi se-Jabodetabek	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	450	Subbid HAL

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
Jambi se-Jabodetabek																	
8.6.Kegiatan Jambi Investment Information (JII)	Nilai Transaksi	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	250	100 %	250	100 %	250	100 %	750	Subbid HAL
8.7. Kegiatan Temu Daerah Perempuan Jambi	Persentase Temu Daerah yang difasilitasi	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	450	Subbid HAL
8.8.Kegiatan Work shop Pemuda Jambi	Persentase Workshop yang difasilitasi	NA	-	-	-	-	-	-	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	450	Subbid HAL
IX.Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Persentase kabupaten/kota dalam provinsi Jambi yang difasilitasi di TMII	10	11	281,53	12	692,59	13	1.045,73	14	1.200	14	1.200	14	1.200	78	6.030,91	Subbid Promosi dan Informasi
9.1.Kegiatan Peningkatan Seni Budaya Daerah Promosi Dan Infomasi	Jumlah Promosi	10	11	281,53	12	692,59	13	1.045,73	14	1.200	14	1.200	14	1.200	78	6.030,91	Subbid Promosi dan Informasi
X.Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jambi di Jakarta	Persentase Pelayanan Masyarakat Jambi yang tidak mampu di Jakarta	NA	-	-	-	-	-	-	-	500	100 %	600	100 %	600	100 %	1.700	Subbid HAL

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.juta)														Unit Kerja Penanggung Jawab
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
			targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	targ et	Rp jt	
10.1.Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah	Persentase Penyediaan makanan dan minuman di Rumah Singgah	NA	-	-	-	-	-	-	500	100 %	500	100 %	600	100 %	1.100	Subbid HAL	
Total : Dana			100 %	7.174,66	100 %	10.225,07	100 %	10.505,95	100 %	25.785	100 %	25.360	100 %	26.305	100 %	104.447,69	
Total : Program dan Kegiatan			6 Program		7 Program 28 Kegiatan		8 Program 26 Kegiatan		10 Program 36 Kegiatan		10 Program 36 Kegiatan		10 Program 38 Kegiatan		-		

Keterangan :

Lampiran 2 ini sesuai dengan Program Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

DATA KENDARAAN BERMOTOR BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI DI JAKARTA

NO	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO. POL/ NO. CHASIS/ NO. MESIN	BAHAN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN	KONDISI	JML	SAT	HARGA PEROLEHAN	KEBERADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEDAN	JAGUAR / S 53 D (Built Up)	B 2259 LQ SAJAC01E9XFL25437 022708360FC	Besi	2000	2.697 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	850,000,000.00	Operasional Kantor
2	SEDAN	TOYOTA / COROLLA ALTIS	B 1440 VQ MR053ZEC257402246 022708360FC	Besi	2005	1.800 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	238,600,000.00	Kasubbid Pelayanan dan Hubungan Antar Lembaga
3	MINI BUS	MITSUBISHI / KUDA VA 1W GLS	B 1618 VQ MHMVA1WHR3K003211 4G18-377702	Besi	2003	1.584 cc (2 Sumbu)		1	Unit	148,000,000.00	Operasional Kantor
4	MINI BUS	NISAN / X-TRAIL 2.5XT A/T	B 1575 VQ T30A27350 QR25-27582A	Besi	2005	2.488 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	279,779,000.00	Operasional Kantor
5	MINI BUS	KIA / TRAVELO K 2700	B 7248 IO MJJSD21127K002688 J2478404	Besi	2007	2.665 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	163,150,000.00	Operasional Kantor
6	MINI BUS	KIA / TRAVELO K 2700	B 7249 IO MJJSD21127K002559 J2474677	Besi	2007	2.665 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	163,150,000.00	Operasional Kantor
7	JEEP	TOYOTA / FORTUNER 2,7 V AT	B 1009 PQH MHFYX59G488014626 2TR-6651691	Besi	2008	2.694 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	395,000,000.00	Gubernur Jambi
8	MINI BUS	TOYOTA / AVANZA	B 1440 PQN MHFM18A3J9K705561 DD99153	Besi	2009	1.298 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	135,150,000.00	Kasubbid Promosi dan Informasi
9	MINI BUS	TOYOTA / AVANZA	B 1439 PQN MHFM18A3J9K149853 DE04348	Besi	2009	1.298 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	135,150,000.00	Operasional Anjungan Jambi Taman Mini Indonesia Indah
10	MINI BUS	ISUZU PANTHER TBR 541 E2 GRAND TOURING	B 1928 PQN MHCTBR54FAK304538 E304538	Besi	2010	2.967 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	230,000,000.00	BAPEGDAPROV
11	SEDAN	HONDA CR- V	B 2077 BQ MHRRE1840BJ100167 R20A1-5810327	Besi	2011	1.977 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	338,000,000.00	BAPEGDAPROV
12	SEDAN	HONDA CITY GM 1,5 E.AT	B 2076 BQ MHRGM2660BP130321 L15A7-5803494	Besi	2011	1497 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	269,000,000.00	BAPEGDAPROV

13	MINI BUS	MITSHUBSHI / L300 BC (4X2) MT	B 1548 PQO MHML0WY39BK005518 R2OA1-5810327	Besi	2011	2.477 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	191,500,000.00	BAPEGDAPROV
14	JEEP	TOYOTA/FORTUNER	B 1109 PQ MHFYX59G5A8019971 2TR-7016731	Besi	2010	2.694 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	458,000,000.00	BAPEGDAPROV
15	MINI BUS	ISUZU / ELF NKR 55 CO E 2- 1	B 7061 PPA MHCNK55EYCJ046204 M046204	Besi	2012	2.771 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	357,838,250.00	BAPEGDAPROV
16	JEEP	TOYOTA / FORTUNER 2,7 V AT	B 2078 BQ MHFYX59G9A8018631 2TR-6966002	Besi	2010	2.694 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	458,000,000.00	BAPEGDAPROV
17	MINI BUS	TOYOTA / HIACE COMMUTER MT	B 7148 PPA JTFSS22P7D0129133 2KDA254481	Besi	2013	94 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	396,430,000.00	BAPEGDAPROV
18	MINI BUS	TOYOTA / KIJANG INNOVA V	B 1669 PQR MHFXW43G1E4089708 1TR7889484	Besi	2014	1.998 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	282,320,000.00	BAPEGDAPROV
19	MINI BUS	TOYOTA AVANZA VELOZ 1	B 1671 PQR MHKM1CA4JEK078116 DEN1310	Besi	2014	1.495 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	174,720,000.00	BAPEGDAPROV
20	MINI BUS	TOYOTA ALPHARD 2,5 G A/ T	B 1671 PQR JTNGF3DH9F8002849 2AR H638130	Besi	2015	2.500 cc (2 Sumbu)	Baik	1	Unit	938,550,000.00	Kend. Dinas Ketua DPRD Prov. Jambi
JUMLAH :								20		6,602,337,250.00	

1	SEPEDA MOTOR	HONDA SUPRA NF 125 S	BH 4419 AZ MGH1JB41175K037002 JB41E-1036940	Besi	2005	125 CC	Baik	1	Unit	11,900,000.00	BAPEGDAPROV
2	SEPEDA MOTOR	HONDA SUPRA NF 125 S	BH 4395 AZ MGH1JB41175K036920 JB41E-1036957	Besi	2005	125 CC	Baik	1	Unit	11,900,000.00	BAPEGDAPROV
3	SEPEDA MOTOR	HONDA SUPRA NF 125 S	BH 4526 AZ MGH1JB41176K052035 JB41E-1051583	Besi	2006	125 CC	Baik	1	Unit	12,075,000.00	BAPEGDAPROV
4	SEPEDA MOTOR	HONDA SUPRA NF 125 S	BH 4523 AZ MGH1JB41106K062079 JB41E-1061430	Besi	2006	125 CC	Baik	1	Unit	12,075,000.00	BAPEGDAPROV
5	SEPEDA MOTOR	HONDA SUPRA NF 125 S	BH 4515 AZ MH1JB41106K052040 JB41E-1051477	Besi	2006	125 CC	Baik	1	Unit	12,075,000.00	BAPEGDAPROV
6	SEPEDA MOTOR	HONDA NEW SUPRA (NF125 TD)	BH 2132 HZ MGH1JB81157K071613 JB81E-1071830	Besi	2007	125 CC	Baik	1	Unit	12,075,000.00	BAPEGDAPROV
7	SEPEDA MOTOR	HONDA/ SUPRA X 125 CW	B 6973 PKQ MGH1JB91109K681007 JB91E1678359	Besi	2009	125 CC	Baik	1	Unit	14,400,000.00	BAPEGDAPROV
8	SEPEDA MOTOR	HONDA/ SUPRA X 125 CW	B 6974 PKQ MGH1JB91109K681217 JB91E1678676	Besi	2009	125 CC	Baik	1	Unit	14,400,000.00	BAPEGDAPROV
9	SEPEDA MOTOR	HONDA/ SUPRA X 125 CW	B 6975 PKQ MGH1JB91109K684327 JB91E1681508	Besi	2009	125 CC	Baik	1	Unit	14,400,000.00	BAPEGDAPROV
10	SEPEDA MOTOR	HONDA/ SUPRA X 125 CW	B 6976 PKQ MGH1JB91109K68432 JB91E168150	Besi	2009	125 CC	Baik	1	Unit	14,400,000.00	BAPEGDAPROV
11	SEPEDA MOTOR	HONDA/ NF 125 CRX	B 6810 PLQ MH1J80111AK135882 JB01E1134408	Besi	2010	125 CC	Baik	1	Unit	15,375,000.00	BAPEGDAPROV
12	SEPEDA MOTOR	HONDA/ NF 125 CRX	B 6808 PLQ MH1J80114AK135827 JB01E1134373	Besi	2010	125 CC	Baik	1	Unit	15,375,000.00	BAPEGDAPROV
13	SEPEDA MOTOR	HONDA/ NF 125 CRX	B 6809 PLQ MH1J80114AK135826 JB01E1134377	Besi	2010	125 CC	Baik	1	Unit	15,375,000.00	BAPEGDAPROV
14	SEPEDA MOTOR	HONDA/ NF 125 CRX	B 6811 PLQ MH1J80114AK135866 JB01E1134329	Besi	2010	125 CC	Baik	1	Unit	15,375,000.00	BAPEGDAPROV

15	SEPEDA MOTOR	SUZUKI THUNDER 125	B 6257 POQ MH8EN125AAJ635120 F 405ID635061	Besi	2011	125 cc	Baik	1	Unit	15,415,000.00	Anj. Jambi TMII
16	SEPEDA MOTOR	SUZUKI THUNDER 125	B 6258 POQ MH8EN125AAJ635183 F 405ID635353	Besi	2011	125 cc	Baik	1	Unit	15,415,000.00	BAPEGDAPROV
JUMLAH :								16	Unit	222,030,000.00	

DATA KENDARAAN BERMOTOR RUSAK BERAT BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAMBI DI JAKARTA

NO	NAMA BARANG	MERK/ TYPE	NO. POL/ NO. CHASIS/ NO. MESIN	BAHAN	TAHUN PEROLEH AN	NOPOL	UKURAN	KONDISI	JML	SAT	HARGA PEROLEHAN	KEBERADAAN
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	SEDAN	Toyota Corolla		Besi	1988	B 8209 XD		RB	1	Unit	36,600,000.00	Kantor Pwk Jambi
2	SCOOTER	VESPA/SCOOTER	VLXIM 78997	Besi	1993	B 8251 GF	150 cc	RB	1	Unit	2,420,000.00	Kantor Pwk Jambi
3	Sepeda Motor	Honda Astrea	NDE- 1239599	Besi	1993	B 4956 LQ	100 cc	RB	1	Unit	5,500,000.00	Kantor Pwk Jambi
4	Sepeda Motor	Honda Astrea	NDE- 1241443	Besi	1993	B 4957 LQ	100 cc	RB	1	Unit	5,500,000.00	Kantor Pwk Jambi
JUMLAH :											50,020,000.00	

an. Kepala Badan
Kasubbid Pengelolaan Mess dan Aset

PUJIMAHWITO, SE. MAP
Penata
NIP. 19790106 100604 1 011

Jakarta, 23 Mei 2017
Pengurus Barang

COKROWINOTO
Pengatur
NIP. 19691119 200801 1 002